

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Sekda Minta Pemdes Tertib Administrasi
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.5
Edisi	: Senin, 25 Juni 2018

Sekda Minta Pemdes Tertib Administrasi

SOREANG, (GM).-

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk kedua kalinya, diharapkan dapat diikuti oleh pemerintah desa (pemdes) agar dapat tertib dalam administrasi pemerintahan desa.

Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Ir. H. Sofian Nataprawira, M.P. di Soreang, belum lama ini. "Salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Apalagi dengan diraihnya opini WTP dari BPK oleh Kabupaten Bandung, pemerintah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dengan pengadministrasian yang lebih tertib," ungkap Sofian.

Sekda menyebutkan, ada lima jenis administrasi yang harus dipahami oleh pemerintah desa, serta kendala yang harus dihadapi dalam

penyusunannya. "Yaitu administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan administrasi lainnya yang meliputi kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LMD). Kelima jenis administrasi ini harus dipahami dan dilaksanakan. Kita harap jangan hanya memerhatikan administrasi keuangan saja, sementara yang lainnya dilupakan," imbuhnya.

Perlu arahan

Sofian melanjutkan, administrasi pemerintahan desa harus lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada pemerintah pusat.

"Sebab itulah, kami mengharapkan adanya arahan berupa sosialisasi dari DPMD semacam ini. Kami ingin menjamin desa di Kab. Bandung mampu mengelola keuangan dan administrasi lainnya dengan baik. Terlebih nanti akan ada pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pengelolaan keuangan di pemerintahan desa," terang Sofian.

Sekda menginginkan ada peningkatan koordinasi antara pihak kecamatan dan desa. "Saya harap koordinasi pemerintah kecamatan dan desa bisa lebih ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui sosialisasi dan juga pembinaan dari kabupaten, akan semakin memaksimalkan

kualitas kompetensi di desa-desa. Sehingga pada gilirannya pemerintah desa bisa lebih tertib administrasi, dan manajemennya lebih akuntabel," pungkas Sofian.

(B.122)**